

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Sektor UMKM adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang memberikan perkembangan atau pertumbuhan kepada Negara. Karena UMKM merupakan bagian terpenting dari perekonomian suatu negara atau daerah, sehingga UMKM dapat dijadikan solusi dalam pengentasan kemiskinan di suatu negara. Menurut Sulistyawati (2020) jika selain perannya untuk menumbuhkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja, UMKM juga mempunyai peran dalam pendistribusian hasil pembangunan. UMKM dapat menjadi gambaran usaha kecil yang mampu berkembang dengan sangat pesat jika dalam pengelolaan yang baik dan benar. Tidak memungkinkan beberapa usaha bisa mengalami perkembangan yang kurang baik yang terkendala akibat permasalahan dalam permodalan karena kurang terpenuhinya syarat untuk melakukan pengajuan pinjaman kepada pihak kreditur (perbankan).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM di Indonesia secara kolektif menyumbang sebagian besar pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pemerataan pendapatan di negara ini. UMKM berperan sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menciptakan lebih dari 97%

lapangan kerja di sektor non-agrikultur (Wahyudi, 2021). Di Indonesia, jumlah UMKM sangat besar. Menurut survei dari Kementerian Koperasi dan UKM per tanggal 9 Agustus 2023 terdapat sekitar 65 juta UMKM yang terdaftar secara resmi, dan diperkirakan masih ada banyak UMKM yang tidak terdaftar secara resmi.

UMKM di Indonesia beroperasi di berbagai sektor industri, termasuk perdagangan, jasa, manufaktur, pertanian, dan pariwisata. Menurut Badan Pusat Statistika Indonesia tahun 2022 menyebutkan bahwa sektor perdagangan berkontribusi terhadap struktur Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sepanjang tahun 2022, sektor perdagangan merupakan kontributor terbesar kedua setelah industri pengolahan dengan kontributor sebesar 12,85%. Sektor perdagangan tumbuh sebesar 5,52% di tahun 2022, meningkat dari 4,63% di tahun sebelumnya.

UMKM di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan dan pertumbuhan mereka. Beberapa tantangan umum meliputi akses terhadap pembiayaan yang terbatas, kurangnya akses ke pasar dan teknologi, kurangnya keterampilan manajerial dan literasi keuangan, serta regulasi yang kompleks (Pinem & Mardiatmi, 2021). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Mereka menyumbang secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, UMKM sering kali menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan mereka dengan baik, yang dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan mereka. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Tahun 2023, jumlah UMKM di Provinsi Bali 429.382. UMKM yang tersebar secara tidak merata di seluruh Kabupaten dan Kota di pulau Bali, data tersebut disajikan dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1.

Data Keragaan UMKM Bali Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Sektor	Klasifikasi Jumlah (2021)	Transformasi Jumlah (2022)
1.	Badung	Perdagangan	10.068	21.699
2.	Bangli	Perdagangan	23.196	44.251
3.	Buleleng	Perdagangan	57.216	66.368
4.	Denpasar	Perdagangan	10.616	29.749
5.	Gianyar	Perdagangan	30.468	75.666
6.	Jembrana	Perdagangan	44.973	57.183
7.	Karangasem	Perdagangan	31.760	50.717
8.	Klungkung	Perdagangan	23.610	35.792
9.	Tabanan	Perdagangan	26.144	47.957
	Jumlah		258.051	429.382

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, 2024

Kabupaten Buleleng memiliki populasi yang signifikan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kabupaten Buleleng memiliki potensi yang besar untuk pengembangan UMKM. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Bali, UMKM di Kabupaten Buleleng telah berkontribusi secara signifikan terhadap lapangan kerja dan perekonomian daerah. Berdasarkan data pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UMKM Kabupaten Buleleng, perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng setiap tahunnya meningkat secara signifikan yaitu pada tahun 2021 sebesar 57.216 usaha, dan pada tahun 2022 sebesar 66.368 sehingga dapat dikatakan bahwa UMKM pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan sebesar 9.152. Dilansir dari berita (Balitbang, 2022), sektor UMKM di Kabupaten Buleleng dalam menopang perekonomian masyarakat Buleleng berkembang dengan baik. Perkembangannya dapat dilihat dari meningkatnya jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Tahun 2022 Buleleng memiliki UMKM sebanyak 66.638 unit. Jumlah ini sangat besar sehingga kontribusi UMKM terhadap

perekenomian Buleleng sangat dirasakan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Astriani (2017) menyatakan jika Kabupaten Buleleng termasuk jumlah pendudukan yang tinggi dan memiliki peluang usaha untuk lebih dikembangkan setelah Kecamatan Gerokgak ialah Kecamatan Buleleng. Hal ini dapat dipahami pada tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Rekap Jumlah Penerbitan IUMK Sektor
Perdagangan Tahun 2019 s/d 2022 Per Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun				Jumlah
		2019	2020	2021	2022	
1	Buleleng	153	115	69	297	634
2	Gerokgak	144	284	292	257	977
3	Sawan	83	83	27	109	302
4	Busungbiu	71	55	43	113	282
5	Banjar	95	34	37	93	259
6	Sukasada	106	59	37	145	347
7	Seririt	69	41	0	123	233
8	Kubutambahan	45	24	19	81	169
9	Tejakula	120	100	100	122	442

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UMKM Kabupaten Buleleng, 2024

Berdasarkan data Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UMKM Kabupaten data jumlah penerbitan IUMK tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu Buleleng 634, Gerokgak 977, Busungbiu 282, Sukasada 347, Seririt 233, Tejakula 442, Banjar 259, Sawan 302, dan Kubutambahan 169. Kecamatan Buleleng menempati posisi pertama dengan penerbitan IUMK terbanyak. Kecamatan Buleleng merupakan sentra dan pusat kota di Kabupaten Buleleng. Segala aktivitas usaha dan segala kegiatan dalam berbagai bidang UMKM lebih berkembang pesat di Kecamatan Buleleng. Perkembangan UMKM pada Kecamatan Buleleng kinerjanya sangat diperhatikan, sebab terjadi banyak

aktivitas yang dilakukan salah satunya yaitu promosi dalam memperkenalkan UMKM melalui pameran dan festival budaya yang rutin dilakukan di Kecamatan Buleleng (Vijaya, D., & Irwansyah, 2017).

Dibalik peningkatan jumlah UMKM di per kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng, namun kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan kinerja UMKM, khususnya di Kecamatan Buleleng. Berdasarkan hasil observasi awal menemukan fakta bahwa kinerja yang dimiliki UMKM di Kecamatan Buleleng tidak cukup baik. Hal ini dilihat melalui tidak adanya peningkatan yang dialami UMKM selama mengembangkan usahanya. Dimana kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan berupa penurunan penjualan, laba, modal, dan kemampuan membayar kredit sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3
Kinerja UMKM Kabupaten Buleleng Tahun 2020

No.	Aspek	Rata-Rata Persentase
1	Penurunan penjualan	61%
2	Penurunan laba usaha	61%
3	Permasalahan modal	Dialami oleh 71,4 UMKM
4	Penurunan kemampuan pembayaran angsuran bank	Dirasakan hampir 100% UMKM

Sumber: Balitbang Kab. Buleleng & LP2M Undiksha (2020)

Tabel 1.3 mencatat penurunan yang cukup mencolok dalam kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Terdapat penurunan signifikan dalam penjualan rata-rata sebesar 61% dan laba usaha rata-rata turun sebesar 61%. Selain itu, sebagian besar UMKM, sekitar 71,4%, menghadapi kendala terkait modal,

sementara hampir semua UMKM kesulitan dalam membayar angsuran kepada bank. Dengan demikian, data tersebut menunjukkan tantangan besar yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah tersebut.

Permasalahan kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng ini masih tetap bertahan hingga Tahun 2023. Menurut data dari Badan Pusat Statistika total dari seluruh UMKM se Kabupaten di Provinsi Bali yang mengalami performa kinerja yang buruk sebanyak 25.166 UMKM sebagaimana data yang tersaji dalam Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4
Performa Kinerja UMKM di Provinsi Bali

No.	Kabupaten/Kota	Performa Kinerja Lebih Buruk (UMKM) Tahun 2023	Persentase Performa Usaha
1	Buleleng	5.231	20,79%
2	Denpasar	4.308	17,12%
3	Gianyar	4.249	16,88%
4	Badung	3.594	14,28%
5	Tabanan	2.511	9,98%
6	Jembrana	2.370	9,42%
7	Bangli	1.222	4,86%
8	Karangasem	1.067	4,24%
9	Klungkung	614	2,44%
	Total UMKM	25.166	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah peneliti (2023)

Dari data tersebut, terlihat bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng menunjukkan tingkat kinerja yang rendah, dengan angka sebesar 5.231 UMKM atau 20,79%. Hal ini menandakan bahwa banyak usaha UMKM yang mengalami stagnasi dan tidak mengalami perkembangan selama masa operasinya jika dibandingkan dengan UMKM di wilayah lain. Kinerja usaha mencakup semua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, penurunan, atau

kestabilan sebuah usaha oleh pelaku UMKM. Tingkat kinerja usaha diukur berdasarkan nilai aset dan laba usaha yang diperoleh UMKM dalam satu periode tertentu.

Dalam menunjang kinerja UMKM yang baik pelaku UMKM harus memahami bagaimana cara melakukan pengelolaan keuangannya pada usahanya. Pengelolaan keuangan adalah salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu akuntansi yang dimilikinya, sehingga menyebabkan pelaku UMKM tidak mampu dalam mengelola keuangan dengan lebih baik dan hal ini yang akan mempengaruhi kinerja pada usaha mereka. Menurut Juniariani (2020) dalam penelitiannya mengatakan jika profesionalisme dalam pengelolaan keuangan dapat membantu pelaku usaha dalam menangani pengelolaan usaha yang dimulai dengan menyusun anggaran, perencanaan simpan pinjam dana usaha hingga pengetahuan dasar atas keuangan dalam mencapai tujuan keuangan usaha. Kinerja yang tercapai dengan baik mampu menunjang keberhasilan bagi perusahaan, sehingga dapat bersaing dalam pasar global. Namun kenyataannya tidak sedikit UMKM yang memiliki kendala dalam meningkatkan kinerja pada perusahaannya. Dalam perkembangannya UMKM masih memiliki kendala secara internal seperti memperoleh modal dan akses informasi sumber-sumber permodalan yang sering kali terkendala jaminan sebagai syarat perolehan kredit (Sulistiog, 2019).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng beliau mengatakan sebagai berikut :

“Banyak sebenarnya masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM dik salah satunya adalah pengelolaan keuangan. Masih banyak pelaku UMKM yang belum dapat melakukan pengelolaan keuangan secara maksimal nike dik, seperti banyak pelaku UMKM yang mencampur antara keuangan bisnis dan keuangan pribadinya, entah itu dipakai beli kebutuhan sehari-hari, dipakai beli sandang atau papan. Dari Dinas Koperasi dan UMKM juga sempat melakukan pembinaan nike dik terkait penyusunan laporan keuangan. Kami mengusahakan sistem informasi akuntansi dapat menjadi solusi agar pengelolaan keuangan dapat menjadi lebih efektif.”

Untuk itu pentingnya sistem informasi akuntansi bagi UMKM. Maka UMKM dapat menyediakan informasi yang lengkap terkait posisi keuangannya. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan dari sumber daya, antara lain manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data informasi. Penerapan sistem informasi akuntansi dapat secara manual maupun terkomputerisasi (Dharmaningsih et al., 2017). Masih sedikit UMKM yang menyadari pentingnya sistem informasi akuntansi, salah satu penyebab adalah kurangnya pemahaman tentang sistem informasi akuntansi, untuk itu diperlukan pengetahuan dasar akuntansi. Kegunaan akuntansi ini sangat bervariasi, mulai dari alat hitung, sumber informasi dan sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Bila dihubungkan dengan pelaku usaha, sepertinya pemahaman akuntansi masih digunakan sebagai alat hitung untuk melakukan pencatatan pada saat terjadi transaksi penjualan dan pembelian, menghitung berapa kas masuk (*cash in flow*) dan kas keluar (*cash out flow*) dan laporan akuntansi sebagai sumber informasi dan pengambilan keputusan (Sitorus., 2017). Selain

itu dalam penyusunan laporan keuangan UMKM masih menggunakan pembukuan yang bersifat sederhana. kurangnya pemahaman pengetahuan akuntansi menyebabkan kinerja pada UMKM belum maksimal padahal sistem informasi yang dijalankan dengan baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SIA menyediakan data keuangan yang akurat dan real-time. Informasi ini membantu pemilik UMKM dalam pengambilan keputusan strategis, seperti mengevaluasi kinerja produk atau layanan tertentu, menentukan harga jual yang tepat, dan mengelola stok dengan lebih efisien. Dengan SIA, UMKM dapat dengan mudah menyusun laporan keuangan yang diperlukan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini membantu menghindari masalah hukum dan denda yang mungkin timbul karena kelalaian dalam pelaporan pajak. SIA dapat meningkatkan efisiensi operasional UMKM dengan otomatisasi beberapa tugas akuntansi. Proses manual yang dapat memakan waktu dapat digantikan dengan sistem yang lebih cepat dan akurat. UMKM yang memiliki inventaris atau stok barang dapat menggunakan SIA untuk memantau persediaan mereka. Hal ini membantu dalam mengelola persediaan dengan lebih efisien, menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Bank atau lembaga keuangan biasanya memerlukan informasi keuangan yang akurat ketika memberikan pembiayaan kepada UMKM. SIA membantu UMKM menyajikan data keuangan yang jelas dan teratur, meningkatkan kemungkinan mendapatkan dukungan finansial (Wahyuni et., 2017).

Moorhead dan Griffin (2013:73) menyatakan bahwa inklusi keuangan merupakan proses untuk memastikan bahwa ada akses untuk menggunakan produk keuangan yang tepat dan dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah yang lemah dan rentan sehingga mereka dapat menggunakan layanan keuangan dengan biaya yang terjangkau secara adil dan transparan. Inklusi Keuangan merupakan upaya untuk meniadakan segala bentuk hambatan harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan (Hidayat et., 2018). Sedangkan menurut Keuangan (2015) Inklusi Keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan Penelitian Bongomin et al (2017) ada 4 (empat) pengukuran inklusi keuangan yaitu: access, usage, welfare, quality. Kemudian Keuangan (2015) membagi indikator dalam inklusi keuangan yaitu akses, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, dan kualitas. Berdasarkan pada penelitian Timuneno et.al (2023) inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM.

Pengendalian biaya merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi kinerja keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengendalian biaya yang efektif memungkinkan UMKM untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka, termasuk bahan baku, tenaga kerja, infrastruktur, dan layanan lainnya. Dalam konteks UMKM, pengendalian biaya yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan, dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Pengendalian biaya pada dasarnya

diciptakan untuk mencapai suatu tujuan, tertentu, baik hal itu merupakan sasaran ataupun sasaran majemuk (Hammer & Lawrence 2018). Tujuan umum suatu organisasi diputuskan dalam suatu perencanaan strategis yang ditetapkan awal proses pengendalian manajemen dimulai. Pengendalian biaya yang ada pada suatu organisasi digolongkan menjadi pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba dan investasi. Tujuan pengendalian Biaya adalah menyediakan informasi biaya bagi manajemen untuk digunakan sebagai dasar mengambil keputusan dan alat pengendalian. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan cara melakukan perencanaan, pencatatan, penggolongan dan pelaporan biaya secara sistematis dan teratur. Penelitian yang dilakukan oleh Agu, C et.al (2018) menyatakan bahwa pengendalian biaya yang efektif berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan profitabilitas dan kinerja keuangan UMKM.

Teori sinyal dalam konteks keuangan merujuk pada konsep di mana perusahaan atau individu mengirimkan "sinyal" kepada pihak lain tentang kondisi keuangannya untuk mengurangi ketidakpastian atau asimetri informasi. Dalam hal UMKM, teori sinyal dapat berarti UMKM menggunakan tanda-tanda atau sinyal tertentu untuk menunjukkan kualitas atau kinerja keuangan mereka kepada pemangku kepentingan, seperti investor atau pemberi pinjaman. UMKM yang memiliki kinerja keuangan yang baik dapat mengirimkan sinyal kualitas bisnis kepada pihak lain. Misalnya, UMKM yang secara konsisten menghasilkan laba yang stabil dan memiliki rasio keuangan yang sehat dapat dianggap memiliki kualitas bisnis yang lebih tinggi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor atau pemberi pinjaman dan meningkatkan akses mereka terhadap sumber pendanaan yang lebih baik.

Peneliti memilih sektor perdagangan karena sektor ini umumnya menjadi fokus utama bagi UMKM di banyak wilayah, termasuk di Kecamatan Buleleng. Perdagangan seringkali menjadi pilihan utama bagi pelaku UMKM karena memiliki peluang pasar yang luas dan beragam. Selain itu, sektor perdagangan juga dapat memberikan gambaran yang representatif tentang berbagai aspek yang memengaruhi kinerja keuangan UMKM, seperti penggunaan sistem informasi akuntansi, inklusi keuangan, dan pengendalian biaya.

Adapun pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel bebas yang digunakan untuk meneliti variabel terikat. Variabel bebas tersebut ialah pengendalian biaya. Pengendalian biaya sebagai *research gap* dikarenakan masih jarang digunakan dalam meneliti kinerja keuangan khususnya pada UMKM.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul mengenai **“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Inklusi Keuangan dan Pengendalian Biaya Terhadap Kinerja Keuangan Pada UMKM Sektor Perdagangan di Kecamatan Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian tersebut, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini diantaranya:

1. Masalah utama yang dihadapi UMKM sektor perdagangan di Kecamatan Buleleng adalah pengelolaan keuangan yang masih belum maksimal ditengah modernisasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi yang seharusnya dapat memudahkan justru belum banyak diimplementasikan oleh para pelaku UMKM.

2. UMKM sektor perdagangan di Kecamatan Buleleng menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses ke layanan keuangan formal, seperti bank, lembaga pembiayaan, dan asuransi. Kendala-kendala ini termasuk persyaratan yang sulit, keterbatasan jaminan, prosedur yang rumit, dan kurangnya pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan yang tersedia. Kurangnya akses ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan UMKM dan menghambat pertumbuhan mereka.
3. UMKM sektor perdagangan di Kecamatan Buleleng mungkin menghadapi tantangan dalam mengelola dan mengendalikan biaya operasional mereka. Kurangnya pemahaman tentang pengendalian biaya yang efektif, kesulitan dalam mengidentifikasi sumber pemborosan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya keuangan yang murah dapat menghambat kemampuan UMKM untuk mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas.
4. Adanya *research gap* dari penelitian terdahulu terkait beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan yang masih perlu dilakukan pengujian dalam penelitian ini, yaitu sistem informasi akuntansi, inklusi keuangan dan pengendalian biaya.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Batasan masalah sangat penting guna memfokuskan penelitian pada beberapa permasalahan juga sejalan dengan variabel penelitian. Sehingga penulis hanya memfokuskan penelitian ini pada Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Inklusi Keuangan dan Pengendalian Biaya Terhadap Kinerja Keuangan pada UMKM Sektor Perdagangan di kecamatan Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah serta pembatasan masalah diatas, adapun rumusan masalah:

- (1) Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM sektor perdagangan di kecamatan Buleleng?
- (2) Apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM sektor perdagangan di kecamatan Buleleng?
- (3) Apakah pengendalian biaya berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM sektor perdagangan di kecamatan Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, berikut tujuannya penelitian:

- (1) Mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan pada UMKM sektor perdagangan di kecamatan Buleleng.
- (2) Mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan pada UMKM sektor perdagangan di kecamatan Buleleng.
- (3) Mengetahui pengaruh pengendalian biaya kinerja keuangan pada UMKM sektor perdagangan di kecamatan Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

- (1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan memperluas ilmu secara teoritis dibidang akuntansi khususnya mengenai kinerja keuangan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

(2) Manfaat Praktis

a. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas serta sumbangan pemikiran mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi, inklusi keuangan dan pengendalian biaya terhadap kinerja keuangan UMKM sehingga dapat membantu agar dapat meningkatkan kinerja keuangan UMKM.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi bagi peneliti selanjutnya serta memberikan informasi berkaitan dengan pengaruh sistem informasi akuntansi, inklusi keuangan dan pengendalian biaya terhadap kinerja keuangan UMKM.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama untuk mengembangkan penelitian ini sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.

